
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) DI DALAM PERKEMBANGAN KARAKTER BANGSA PESERTA DIDIK SD

Rizki Aprian Saputra¹, Dani Setiawan², M Adnand Hariri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Pringsewu

rizki.2020406405138@student.umpri.ac.id¹, dani.2022406405138@student.umpri.ac.id², adnand.2022406405105@student.umpri.ac.id³

***ABSTRACT;** Indonesia faces many problems, especially the attitudes of young people who have begun to deviate principles of Pancasila. Teaching citizenship is the answer to the problems of Indonesian youth because it is an activity that develops three skills: citizenship education, citizenship education. This study aims to reveal how citizenship education supports the construction of national culture and how citizenship education plays an important role in public education. Qualitative methods and research articles were used in this study. Data analytics is a data retrieval technique used in conjunction with data mining and analysis. The citizenship program, the materials taught to students, and the use of vocabulary have changed every year since the founding of Indonesia. Citizenship education can be taught in all types of education, from public education to community and non-formal education, because citizenship education is a resource that will strengthen the values of Pancasila. Citizenship education can also be used as a tool to teach democracy and community building. The World Health Organization has a structure. We believe that through democratic education based on Pancasila and the 1945 Constitution.*

***Keywords:** Development, Citizenship Education, National Character.*

ABSTRAK; Indonesia sedang menghadapi banyak permasalahan, terutama sikap generasi muda yang mulai menyimpang dari asas Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan merupakan jawaban atas permasalahan generasi muda di Indonesia karena merupakan kegiatan yang mengembangkan tiga keterampilan: kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendidikan kewarganegaraan mendukung konstruksi kebudayaan nasional dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam pendidikan masyarakat. Metode kualitatif dan penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Analisis isi adalah teknik pengambilan data yang digunakan bersamaan dengan penggalan dan analisis data. Program kewarganegaraan, materi yang diajarkan kepada siswa, dan penggunaan kosakata telah berubah setiap tahun sejak berdirinya Indonesia. IPS dapat diajarkan di semua jenis pendidikan, dimulai

dari sekolah tradisional. Karena pengajaran kewarganegaraan merupakan awal dari penguatan nilai Pancasila, maka pendidikan kewarganegaraan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengajarkan demokrasi untuk membangun masyarakat. Mereka memiliki budaya demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kami percaya melalui pendidikan kewarganegaraan, anak-anak dapat mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menjadi warga negara yang baik.

Kata Kunci: Perkembangan, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa.

PENDAHULUAN

Negara ini tujuan dasar yang ditetapkan oleh para pendirinya yang akan diteruskan kepada generasi pemuda penerusnya. Peran dan peranan pemuda sangatlah penting dalam menunjang dan menjaga kesejahteraan masyarakat tanah air. Indonesia adalah negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di bawah kepemimpinan generasi muda seperti Sukarno, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta dan lain-lain, yang mendirikan ideologi negara (Pancasila) dan konstitusi (UUD) pada saat itu. 1945) dianggap sebagai salah satu tugas generasi mudanya, karena masa depan Indonesia akan terkena dampak pencurian, penggunaan narkoba, aktivitas anarkis, dan lain-lain. Dipimpin oleh generasi muda masa kini yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila seperti Pada umumnya remaja masa kini mempunyai permasalahan karakter yang menyebabkan banyak orang melakukan kejahatan. Astuti (2010:41) mengemukakan bahwa generasi muda mempunyai permasalahan karakter. Dalam pidato pembukaan Konferensi Pemuda Nasional, Imam Nohrowi mengatakan bahwa perilaku pemuda masa kini menunjukkan adanya permasalahan moral yang dapat mempengaruhi masa depan Indonesia atau menghalangi mereka untuk mewarisi warisan kepemimpinan. Pertimbangkan hegemoni dan kapitalisme (Cahyono, 27 April 2015: jogjosemar.com). Mengecek apakah generasi muda mempunyai budaya berdasarkan Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara; Kajian budaya merupakan salah satu kajian yang ada. Menurut Muslich (2011:1), pendidikan budaya merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Di sisi lain, Pasal 3 Peraturan Sistem Pendidikan Nomor 20 yang diterbitkan pada tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengubah struktur dan kebudayaannya serta meningkatkan kualitas hidup negara. Menjadi bijaksana. Hal ini juga bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang demokratis, bertanggung jawab, bermoral, sehat, berilmu, berbakat, kreatif dan mandiri,

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Singkatnya, tujuan utama pendidikan nasional adalah pendidikan kebudayaan. Pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur pendidikan seperti pendidikan nonformal (keluarga), pendidikan nonformal (kelompok belajar, karang taruna) , pendidikan formal (sekolah dan universitas). Namun masyarakat sangat menghargai pendidikan formal dapat mengembangkan karakter generasi muda; Namun pendidikan formal dan nonformal juga dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan karakter. Meskipun sangat penting untuk mengevaluasi situasi dalam setiap pembelajaran, namun hal ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai pendidikan masyarakat, khususnya studi komunitas dan kelas-kelas yang dapat mengubah sifat pencarian ilmu pengetahuan generasi muda. sekolah Pasal 23 Pasal 37 tahun 2003 mensyaratkan bahwa program sekolah dasar, menengah dan atas, termasuk pendidikan kewarganegaraan, diajarkan di tingkat universitas di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menawarkan dunia penelitian yang menarik dan teknik kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan teknik pengumpulan data yang mencakup berbagai sumber seperti artikel berita, kajian nasional dan internasional, buku atau e-book, disertasi, media online dan jurnal cetak, dan banyak lagi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Freankel dan Wallen menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam analisis isi, termasuk :

(1) mengidentifikasi tujuan, (2) mendefinisikan istilah, (3) mengkategorikan, (4) menemukan informasi yang relevan, (5) membandingkan ide, dan mensintesis temuan. (6) pengumpulan data dan (7) klasifikasi (Sari dan Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesi

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sering mengalami perubahan karena semakin kompleksnya sifat kewarganegaraan di Indonesia. Meskipun ditekankan bahwa landasan sistem sekolah negeri adalah penciptaan dan pengembangan komunitas intelektual, demokratis, dan religius, tidak ada kursus kewarganegaraan atau kualifikasi lainnya yang dimasukkan pada tahun 1947. Sedangkan artikel diterbitkan pada

kelompok I sampai VI. Hubungi grup. IV. kesehatan di sekolah. VI. Dari seri. Kegiatan keagamaan sampai batas tertentu dimasukkan (Winataputra, 2012: 9). Evolusi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan perjalanan yang membingungkan melalui metode pengajaran dan pembelajaran yang berbeda, membawa perubahan dan perubahan dalam perjalanannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan kebijakan untuk memasukkan kata kewarganegaraan dalam Program Penelitian Kewarganegaraan tahun 1957, yang memuat informasi tentang perolehan dan hilangnya kewarganegaraan di Indonesia serta hak dan tanggung jawab pemerintah. . Kami adalah warga negara Indonesia. . Ada kelas-kelas yang berfokus pada pemerintahan dan hukum untuk siswa sekolah menengah. Keluarnya Keputusan Presiden Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia, terutama penggunaan kata “Kewarganegaraan” yang berarti “Kewarganegaraan”. Mata kuliah tersebut meliputi sejarah nasionalisme, UUD 1945, Pidato presiden untuk bangsa, dan pembangunan kebudayaan. Saat itu guru masih menggunakan buku seperti “Kewarganegaraan dan Masyarakat Indonesia Baru” dan “Tujuh Keinginan”. Dikenal juga dengan nama TUBAPI (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Kedua buku tersebut ditulis oleh Ir. Sukarno dan rekannya banyak yang meneliti tentang sejarah perjuangan kemerdekaan di Indonesia saat itu. Sebab masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, yang belum memaham jelas dan mendalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Pada tahun 1962, mantan Menteri Kehakiman Suhardjo mengusulkan agar kata Kewarganegaraan diubah menjadi Kewarganegaraan Nasional karena ia fokus untuk masuk ke dalam kategori Kewarganegaraan. Usulan ini disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, namun perubahannya tidak ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Saat itu, sistem pendidikan di Indonesia mencakup 2 mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan: pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan kedua istilah tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Kewarganegaraan mengajarkan sejarah perjuangan di Indonesia, sedangkan Kewarganegaraan mengajarkan kehidupan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Perubahan ini dilandasi oleh apa yang ingin dicapai Indonesia: mengembangkan masyarakat yang sehat dan cerdas.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah upaya praktis untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tanggung jawab masa depan melalui bimbingan dan pelatihan (Bakry 2009: 2). Pendidikan kewarganegaraan merupakan cara untuk mengembangkan karakter generasi muda dan menjadi warga yang baik. Dalam Pancasila, kebudayaan ialah landasan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lima nilai, yaitu negara agama, negara yang mengutamakan nilai-nilai kemasyarakatan, negara yang mengutamakan nilai-nilai persatuan, dan negara yang mengutamakan nilai-nilai adat. bagian. Negara juga mengedepankan nilai persatuan. Negara ini mengedepankan nilai keadilan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Jenis pelatihan ini dapat diberikan di lokasi atau lingkungan berbeda; misalnya melalui lembaga pendidikan formal (sekolah dan universitas), jaringan informal (perkumpulan, kelompok belajar, kursus, dll) dan jaringan informal (lingkungan keluarga dan masyarakat). Pendidikan nonformal ibarat akar pohon yang mula-mula melahirkan nilai-nilai politik kemudian mengubah sifat peserta didik menuju pendidikan formal dan nonformal. Peran pendidikan formal disini adalah mentransformasikan pengetahuan karakter dan keterampilan peserta didik, melalui pendidikan kewarganegaraan, agar mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan baik setelah lulus. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan cukup luas karena mencakup berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Sapriya (2007:178), dari sudut pandang pendidikan, pendidikan kewarganegaraan dipandang pada tingkatan yang berbeda. Hal ini mempunyai dua fungsi penting: Pertama, menciptakan tingkat pengetahuan yang dapat digolongkan sebagai tingkat pendidikan kewarganegaraan. Jenjang ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Kedua, pengembangan pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pengembangan kebudayaan nasional. Pertama, memberikan tingkat pengetahuan yang dapat digunakan sebagai tingkat pendidikan kewarganegaraan. Bidang ini berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan bertujuan untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Kedua, memajukan pendidikan kewarganegaraan dan memajukan kebudayaan nasional. Pada tataran ini dibahas kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah dan/atau mentransfer gagasan, nilai, perilaku dan keinginan dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan melalui proses pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat. Di sisi lain, guru dan pendidik perlu mengambil peran yang lebih nyata dan penting sebagai pendidik, karena terbentuknya peserta didik yang berkualitas sangat bergantung pada karakter yang ditunjukkan

oleh guru. Untuk melahirkan generasi pemimpin Indonesia yang baik di masa depan, guru perlu menunjukkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sehingga gagasan saling menghormati dan meneladani dapat disebarluaskan. Gagasan ini tampaknya telah runtuh di masyarakat karena banyak guru dan profesor yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk melahirkan generasi pemimpin Indonesia yang baik di masa depan, guru perlu mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila, agar gagasan saling menghormati dan memberi keteladanan tersebar luas. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Pendidik yang disetujui pada tahun 2005, guru wajib memiliki empat (4) kualifikasi: kualifikasi akademik, personal, profesional, dan sosial. Untuk mendorong dan mengembangkan generasi muda agar memiliki pengetahuan, budaya dan keterampilan memahami negara, guru yang bertanggung jawab dalam pendidikan kewarganegaraan harus memiliki keempat keterampilan tersebut. Kewarganegaraan juga memegang peranan penting dalam pendidikan di Indonesia; Kami percaya bahwa keberhasilan peserta didik yang menerima dan menyebarkan pendidikan sipil dan non-hukum dapat mempengaruhi dunia pendidikan, politik dan pendidikan. Akhlak meliputi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak yang baik, cinta tanah air, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi untuk kebaikan umat. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mendidik generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Tidak mungkin menciptakan masa kecil yang baik tanpa nilai dan pendidikan. PKN juga dapat berfungsi sebagai pendidikan budaya yang dapat digunakan dalam keluarga, yang menjadi landasan penting dalam pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan kewarganegaraan dapat dipandang sebagai pendidikan demokratis dalam sistem pendidikan umum. Pendidikan demokratis adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan; Penting sekali hal ini diterapkan di masyarakat, terutama lintas generasi. Menurut Azra Zaromi, Ubedillah dan lain-lain. Demokrasi adalah proses pembelajaran yang tidak dapat ditiru di organisasi lain, dan demokrasi yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan untuk mengubah nilai-nilai demokrasi. Belakangan ini banyak kelompok yang menyerang monarki atas nama kebebasan berpikir dan mengklaim Indonesia adalah negara demokratis. Ada pula kelompok yang mendorong agar Indonesia menjadi negara bebas yang mengutamakan kebebasan individu di atas kesejahteraan umum. Namun demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1999 tidak sama dengan demokrasi di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Demokrasi Indonesia mengedepankan kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang serta mengedepankan nilai-nilai universal berdasarkan Pancasila.

Melihat sejarah Indonesia, merupakan negara demokrasi yang selalu mengambil keputusan melalui perundingan. Harapannya, pendidikan demokrasi dapat mengubah perilaku generasi muda di Indonesia. Kewarganegaraan adalah istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengacu pada nilai-nilai atau nilai-nilai dan komitmen yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis. Pemuda merupakan kunci pembangunan masa depan, sehingga pemuda Indonesia harus memiliki nilai-nilai demokrasi jika ingin mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan sebelum UUD 1945 (Kalidjernih, 2010: 21). Menurut Inkeles' Cholisin (2013:92), ciri-ciri orang demokratis adalah: 1. Penerimaan dan keterbukaan terhadap rakyat. Bagikan pengalaman dan pemikiran Anda. 3. Tanggapi tanggung jawab Anda dengan serius. 4. Sabar 5. Dapat mengendalikan emosi Kami yakin nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, sehingga tercapai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Kefanatikan, kefanatikan, dll di Indonesia. Dalam konteks konflik, peran pkn sebagai pendidikan demokrasi menjadi semakin penting. Hal ini berperan penting dalam penamaan negara karena berbagai alasan, terutama budaya demokrasi

KESIMPULAN

Remaja Indonesia mempunyai banyak permasalahan sosial dan perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perkembangan pkn di Indonesia telah banyak mengalami perubahan; Kosakata dan materi yang diajarkan kepada siswa terus berubah. Pengajaran kewarganegaraan dipandang sebagai solusi untuk membangun budaya generasi muda Indonesia karena pengajaran kewarganegaraan mengutamakan tiga keterampilan yang harus diajarkan kepada siswa: manajemen, manajemen keluarga, dan kehidupan sosial. budaya masyarakat). Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan nonformal. Selain itu, pendidikan hendaknya memiliki empat (empat) keterampilan untuk membangun karakter peserta didik: akademik, vokasi, personal, dan sosial. Pkn juga dapat mengintegrasikan ajaran Pancasila dan demokrasi berdasarkan UUD dan UUD 1945 serta menghasilkan pemimpin yang demokratis. Ini penting dan berperan besar dalam menentukan apa yang terjadi di masa depan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. (2021). Pengamalan Nilai- Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Literasi Budaya

- Menyongsong Era Revolusi 4 . 0 di SMKN 3 Banjarbaru Practicing Pancasila Values in Improving Cultural Literacy Welcoming the 4 . 0 Revolution Era at SMKN 3 Banjarbaru. Almubaroq, hikmat zakky. (2024). *jangan main-main dengan pendidikan atau akan lahir generasi mainan*. Bandung. Indonesia emas group
- Arfa, A. M., & Lasaiba, M. A. (2022). Pendidikan Multikultural dan Implementasinya di Dunia Pendidikan. *GEOFORUM*, 1(2)
- Azizah, N. R. (2021). Implementasi literasi budaya dan kewargaan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa Madrasah Ibtidaiyah di tengah pandemi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Dewi, larasati. dkk. (2023). Pentingnya penguasaan literasi budaya dan kewarganegaraan pada generasi milenial. *Jurnal pendidikan indonesia*.
- Dr.H. S. Ichas Hamid, M. P., Dra.Hj.Tuti Istianti, M. P., & Fauzi Abdillah, S. P. M. P. (n.d.). Model Pembelajaran LITERASI BUDAYA KEWARGANEGARAAN DALAM PPKn BERBASIS TRADISI LOKAL NUSANTARA DI SEKOLAH DASAR
- Hamid, S. I., Istianti, T., Firmansyah, F., Ismail, H., & Abdilah, F. (2020). Implementasi Model Literasi Kewarganegaraan Berbasis Tradisi Lokal Sunda Melalui Pembelajaran Tembang
- Jariah, S., Literasi, M., & Literasi, M. (2019). Peran guru dalam gerakan literasi sekolah.
- Julianto, C. D. (2018). Keterampilan Literasi Media Sosial Untuk Menanamkan Nilai Kebhinekaan. In Seminar Internasional Riksa Bahasa Kewarganegaraan, K. (2018). PENGARUH BUDAYA LITERASI DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN KEWARGANEGARAAN. 4(1)
- Nurhasanah, nina & putri, fara diba catur. (2023). Implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan sebagai upaya dalam mengembangkan berkebhinekaan global di sekolah dasar. *Jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan sejarah*.
- Rahmawati, N., Prasetyo, W. H., Wicaksono, R. B., & Huda, M. (2022). Pemanfaatan Sudut Baca dalam Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan Siswa di Era Digital.
- Safitri, S., dan Ramdhan, Z. H. (2022). Implementasi literasi budaya dan kewarganegaraan di sekolah dasar. *Mimbar ilmu*, 27(1)
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1)

Zulqarnain. (2023). *Gerakan literasi sekolah pada jenjang sekolah dasar dan menengah di kabupaten batang hari*. Yogyakarta. Deepublish